
BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Kota Batu ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu, sedangkan rincian tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Batu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan rincian tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 70 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Batu. Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah :

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/98 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Penanganan Kasus-kasus yang berindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
7. Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

-
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Walikota Batu Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Batu sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Batu.

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang pengawasan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, Inspektorat selaku Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis tahun 2018 – 2022 dan Rencana Kerja Tahunan 2018 yang menjadi pedoman instansi untuk mengimplementasikan tugas dan fungsi bidang urusan pengawasan serta pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya. Ketentuan pelaksanaan program instansi pemerintah dituntut memenuhi akuntabilitas berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Kedudukan Inspektorat Kota Batu merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki unsur pengawasan daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab langsung kepada Walikota

dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Wakil Walikota dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

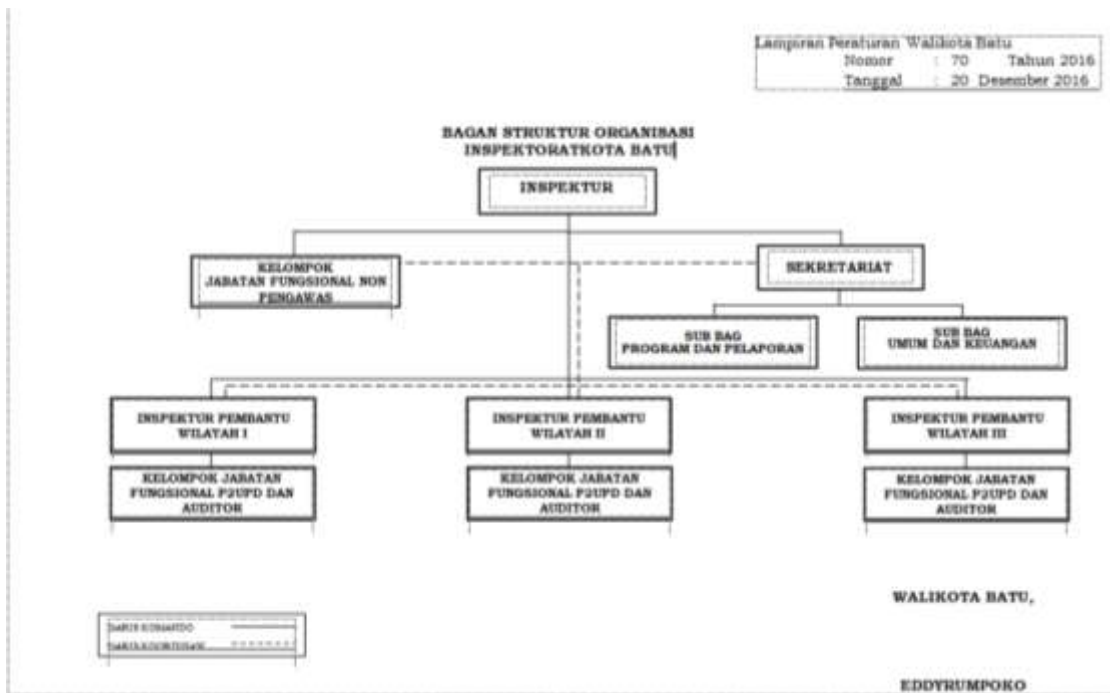
Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Inspektorat kota Batu *Inspektorat* mempunyai tugas membantu Walikota, membina, dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, *Inspektorat menyelenggarakan fungsi:*

- a. penyusunan perencanaan program bidang pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Batu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2013 dan tanggal 28 Juni 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 70 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:



1.4 DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Pegawai Inspektorat Kota Batu
Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2018

NO	JABATAN STRUKTURAL	JUMLAH
1	Inspektur (Eselon IIb)	1
2	Inspektur Pembantu/Sekretaris (Eselon III a)	4
3	Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian (Eselon IVa)	2
4	Auditor	19
5	Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)	7
6	Pelaksana	11
	Jumlah	44

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi

A. Visi

Visi Inspektorat Kota Batu (berdasarkan tujuan RPJMD Kota Batu 2018 - 2022) adalah :

“Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel guna mewujudkan Batu Kota Berintegritas”

B. Misi

Misi Inspektorat Kota Batu :

“Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan”

C. Tujuan

“Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel”

Indikator Tujuan : 1. Opini BPK, 2. Skor Nilai SAKIP

D. Sasaran

- 1) Meningkatnya kualitas pengawasan internal;
- 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah.

Indikator sasaran :

1. Persentase maturitas SPIP OPD sampai tingkat “terdefinisi”
2. Persentase PD yang nilai evaluasi SAKIP minimal B

2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Kota Batu

A. Sasaran Strategis Inspektorat Kota Batu

Dalam mewujudkan visi, menjalankan misi, dan mencapai tujuan yang diharapkan maka strategi pokok yang ditempuh Inspektorat Kota Batu adalah :

-
- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel dengan Indikator;

- a) *Opini BPK*

- b) *Predikat Nilai SAKIP*

Untuk meraih Opini BPK maka Inspektorat Kota Batu memiliki sasaran meningkatnya kualitas pengawasan internal dengan Indikator Persentase Maturitas SPIP OPD sampai tingkat terdefinisi dengan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH ;

1. *Persentase OPD dan Desa bebas indikasi temuan kerugian daerah*

2. *Persentase tindak lanjut temuan pemeriksaan*

3. *Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti*

Untuk meraih Predikat nilai SAKIP maka Inspektorat Kota Batu memiliki sasaran dengan Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan pemerintah dengan Indikator Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi *minimal B* dengan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan;

1. *Persentase OPD yang memiliki dokumen sakip sesuai ketentuan.*

2.3 Matriks Renstra Inspektorat Kota Batu

Untuk mengembangkan visi misi Inspektorat Kota Batu tersebut maka tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam matriks sebagai berikut sebagai berikut :

MATRIKS RENSTRA INSPEKTORAT
Periode Tahun 2017 - 2022

Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Kondisi Awal 2018	Target Tahun 2022
1.	Opini BPK	Penilaian BPK atas Audit terhadap LKPD Kota Batu	WTP (LKPD TA 2016)	WTP
2.	Skor Nilai SAKIP	Penilaian KemenPAN RB terhadap SAKIP Kota Batu	C	A

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Kondisi Awal 2018						Program
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya kualitas pengawasan internal	<i>Persentase Maturitas SPIP OPD sampai tingkat terdefinisi</i>	(LHE SPIP OPD tingkat terdefinisi/LHE SPIP OPD Total) x 100%	N/A	25%	50%	75%	100%	100%	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
	Persentase OPD dan Desa bebas indikasi temuan kerugian daerah	Jumlah OPD dan Desa bebas dari temuan kerugian daerah/ Jumlah Seluruh Desa x 100%	87.50%	90%	95%	95%	100%	100%	
	Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	jumlah pengaduan/kasus yang ditangani/ Jumlah seluruh pengaduan/kasus yang masuk di Inspektorat x 100%	104%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase tindak lanjut temuan pemeriksaan	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan (eksternal & internal) yang ditindaklanjuti/ Jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan x 100%	87%	80%	90%	95%	100%	100%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan pemerintah	Persentase OPD yang memiliki nilai Evaluasi SAKIP minimal B	Jumlah OPD dengan Predikat Nilai minimal B / Jumlah OPD X 100%	34 %	50 %	75%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Persentase OPD yang memiliki dokumen sesuai ketentuan	Jumlah OPD dengan Kelengkapan Dokumen Sakip OPD Total) x 100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

B. Sebelum Penetapan RPJMD 2017-2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4
1. Meningkatnya akuntabilitas pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai SAP	%	80
	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B	%	50
	Persentase PD yang maturitas SPIP sampai tingkat "terdefinisi"	%	25
	Persentase Desa bebas dari temuan kerugian daerah	%	80
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (Eksternal & Internal) Yang Ditindaklanjuti	%	80
	Persentase Pengaduan/kasus Yang Ditindaklanjuti	%	100
2. Meningkatnya kapabilitas dan profesionalitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	2
	Persentase terlaksananya kegiatan pengawasan yang telah direncanakan	%	100

Program :

NOMOR	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	640.973.100,-	APBD Tahun 2018
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	164.600.000,-	APBD Tahun 2018

3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	31.190.000,-	APBD Tahun 2018
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	41.998.100	APBD Tahun 2018
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	147.053.500,-	APBD Tahun 2018
6.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.807.080.900,-	APBD Tahun 2018
7.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	382.897.200,-	APBD Tahun 2018
8.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	938.500,-	APBD Tahun 2018
	Jumlah	3.216.731.3 00,-	APBD Tahun 2018

C. Setelah Penetapan RPJMD dan Perubahan anggaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4
1. Meningkatnya kualitas pengawasan internal	Persentase Maturitas SPIP OPD sampai tingkat terdefinisi	%	25
	Persentase OPD bebas indikasi temuan kerugian daerah	%	90
	Persentase Desa bebas indikasi temuan kerugian daerah	%	25

	Persentase tindak lanjut temuan pemeriksaan	%	80
	Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan pemerintah	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi minimal B	%	100

Program setelah PAK :

NOMOR	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	741.134.100,-	APBD Tahun 2018
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	576.600.000,-	APBD Tahun 2018
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	31.190.000,-	APBD Tahun 2018
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.042.100,-	APBD Tahun 2018
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	123.805.600,-	APBD Tahun 2018
6.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.582.989.400,-	APBD Tahun 2018

7.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	527.981.600,-	APBD Tahun 2018
8.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	938.500,-	APBD Tahun 2018
	Jumlah	3.624.681.300,-	APBD Tahun 2018

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 2018

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat berdasarkan indikator kinerja utama Inspektorat yaitu :

a. **Meningkatnya kualitas pengawasan internal .**

Meningkatnya kualitas pengawasan internal dengan indikator Opini BPK berpredikat WTP, secara teknis dapat diperoleh apabila pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan yang baik. Untuk mendapatkan Opini BPK berpredikat WTP maka peran Inspektorat melalui fungsi pengawasan ada 2(dua), yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan sesuai SAP dan pengawasan terhadap Sistem pengendalian Internal Pemerintahan.

Melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan indikator :

1. *Persentase Maturitas SPIP OPD sampai tingkat terdefinisi*
2. Persentase OPD dan Desa bebas indikasi temuan kerugian daerah
3. Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti
4. Persentase tindak lanjut temuan pemeriksaan

Indikator *Persentase Maturitas SPIP OPD sampai tingkat terdefinisi* pada tahun 2018 target yang dibebankan adalah 25 persen OPD memiliki maturitas SPIP *tingkat terdefinisi*, maka penilaian tahun 2018 dilaksanakan pada 10 OPD yang merepresentasikan entitas Pemerintah Daerah, yaitu: Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Organisasi, Badan Keuangan Daerah, Dinas Penanaman

Modal, Perijinan dan Tenaga Kerja dan Dinas Sosial. Berdasarkan hasil reviu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa timur Nomor : LR-701/PW13/3/2018 tanggal 18 September 2018 Maturitas SPIP Pemerintah Kota Batu yang direviu secara uji petik terhadap 10 OPD diperoleh Nilai 3,2761 atau dengan kata lain telah memiliki Maturitas SPIP tingkat terdefinisi.

Indikator persentase OPD dan Desa bebas indikasi temuan kerugian daerah dilaksanakan melalui kegiatan Pemeriksaan Rutin (PKPT) yang dilaksanakan secara uji petik kepada 36 Obrik dari 72 Obrik diperoleh hasil bahwa terdapat 3 entitas yang memiliki indikasi kerugian daerah karena kurang cermat dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Namun temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan pengembalian kelebihan bayar pengadaan barang dan jasa kepada Kas Negara. Sehingga pada Tahun 2018 dengan target Persentase OPD dan Desa bebas indikasi temuan kerugian daerah sebesar 90 persen tercapai 91,6 persen

Indikator Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti merupakan salah satu bentuk pelayanan pengaduan khususnya pengaduan terhadap Aparatur Sipil Negara. Dalam tahun 2018 terdapat 20 Kasus pengaduan 7 masalah kepegawaian, 10 masalah rumah tangga dan 3 indikasi pidana dan kerugian daerah. Target tahun 2018 sebesar 100 persen telah dilaksanakan semua.

Indikator Persentase tindak lanjut temuan pemeriksaan dengan target sebesar 80 persen, dapat diketahui melalui perhitungan dari tindaklanjut temuan dari pemeriksaan APIP dan tindaklanjut temuan dari Badan Pemeriksa keuangan. Pada Tahun 2018 Tindaklanjut Pemeriksaan Oleh APIP dilaksanakan kepada 9 entitas dan telah ditindaklanjuti tuntas 7 entitas, sedangkan 2 entitas sedang dalam proses tindak lanjut. Untuk Tindaklanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dari 702 Rekomendasi Tindak Lanjut telah terselesaikan 600 rekomendasi. Maka dapat disimpulkan bahwa tindak lanjut temuan pemeriksaan diperoleh nilai kinerja sebesar 85 %.

b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah

Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah secara teknis dapat diperoleh apabila Predikat Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah berpredikat minimal Baik. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) merupakan evaluasi dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja OPD. Penilaian SAKIP dilakukan atas dokumen yang dipersyaratkan dalam Lembar Kerja Evaluasi. Evaluasi SAKIP dilaksanakan kepada 29 entitas. Pada tahun 2018 Evaluasi Sakip dilaksanakan 3 Kali dengan metode penilaian berkas, desk verifikasi, dan evaluasi bersama Tim Penilai. Seluruh OPD telah dilakukan evaluasi dengan hasil nilai antara 60,1 Sampai dengan 69,9. 27 OPD telah mencapai nilai B pada saat proses desk. Dan 2 OPD mencapai nilai B pada saat evaluasi bersama Tim Penilai. Maka capaian kinerja sebesar 100 persen.

Maka Kinerja Inspektorat dapat direkapitulasi sebagaimana tabel dibawah ini.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET SATUAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	4	5	6
1. Meningkatnya kualitas pengawasan internal	<i>Persentase Maturitas SPIP OPD sampai tingkat terdefinisi</i>	25%	35%	140%
	Persentase OPD dan Desa bebas indikasi temuan kerugian daerah	90%	91,6%	101%
	Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Persentase tindak lanjut temuan pemeriksaan	80%	85 %	106%
2. Meningkatnya akuntabilitas	Persentase OPD yang memiliki nilai	100%	100%	100%

kinerja SKPD di lingkungan pemerintah	Evaluasi minimal B	SAKIP			
---------------------------------------	--------------------	-------	--	--	--

Tabel 3.1 Tabel Capaian Kinerja

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Utama Inspektorat yaitu Opini BPK berpredikat WTP dan Nilai Sakip berpredikat Baik telah tercapai. Indikator Kinerja Program yaitu *Persentase Maturitas SPIP OPD sampai tingkat terdefinisi*, *Persentase OPD dan Desa bebas indikasi temuan kerugian daerah*, *Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti*, *Persentase tindak lanjut temuan pemeriksaan dan Presentase OPD dengan Predikat Sakip B* telah tercapai dengan sangat baik. Namun perlu ada perbaikan untuk meningkatkan tingkat substansi. Karena cara perolehan nilai target untuk *Persentase Maturitas SPIP OPD sampai tingkat terdefinisi dan Persentase OPD dan Desa bebas indikasi temuan kerugian daerah* masih menggunakan metode uji petik atau *sampling*.

Keterbatasan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat menjadi sebuah kendala dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh. Keterbatasan jumlah personel APIP menyebabkan tidak semua Entitas mendapatkan pengawasan. Kekurangan Kualitas SDM APIP dapat diketahui dari penilaian kapabilitas APIP. Kapabilitas APIP secara Nasional harus berada pada level 3, namun Kapabilitas APIP Kota Batu masih berada pada menuju level 2.

Secara kelembagaan Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD baru dibentuk secara resmi pada tahun 2018, sehingga dibutuhkan kerja keras dalam meningkatkan kapabilitas APIP Level 3 sebagaimana target Nasional. Agar Tingkat Kapabilitas APIP meningkat dari rintisan Level 2 menjadi Level 3 diperlukan beberapa rencana percepatan dengan membentuk tim Peningkatan Kapabilitas APIP. Sehingga tujuan **Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel** dapat terwujud.

3.3 Prestasi yang dicapai Tingkat Provinsi dan Nasional

Prestasi yang diperoleh dari kinerja Pengawasan adalah Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan berpredikat Wajar Tanpa pengecualian (WTP) 3 (tiga) tahun berturut-turut mulai tahun 2016, 2017 dan 2018

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, total belanja sebesar Rp. 9.118.514.382,00 terbagi atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.493.833.082,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.624.681.300,00 sampai dengan akhir anggaran Realiasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.4.750.242.687,00 Realisasi Belanja Langsung Sebesar Rp.2.781.182.131,00 Dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Anggaran : Rp. 198.500.000,00
 - Realisasi : Rp. 187.550.000,00
 - Prosentase : 94,48%
 - Hasil : pembayaran honorarium pengelola keuangan, pelaksana pengadaan barang jasa dan honorarium pegawai honorer/tidak tetap.
 - Penjelasan : pembayaran sesuai penganggaran
- 2) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - Anggaran : Rp. 6.486.000,00
 - Realisasi : Rp. 945.000,00
 - Prosentase : 14,57 %
 - Hasil : pembiayaan jasa servis PC, laptop,cprinter, dan mesin fotocopy.
 - Penjelasan : pembiayaan menyesuaikan kebutuhan pemeliharaan.
- 3) Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Anggaran : Rp. 47.647.140,00
 - Realisasi : Rp. 40.814.300,00

-
- Prosentase : 85,66 %
- Hasil : pembiayaan penyediaan alat tulis kantor.
- Penjelasan : terdapat penyesuaian pada belanja alat tulis kantor menyesuaikan jumlah persediaan setiap bulan.
- 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Anggaran : Rp. 27.051.000,00
- Realisasi : Rp. 15.146.755,00
- Prosentase : 55,99%
- Hasil : pembiayaan untuk pengadaan barang cetakan kantor seperti map dinas, amplop dinas serta fotokopi dokumen administrasi kantor, termasuk belanja cetak karangan bunga dan umbul-umbul.
- Penjelasan : terdapat penyesuaian pada belanja cetak karangan bunga dan umbul-umbul bergantung kebutuhan riil tahun berjalan, penyesuaian pada belanja cetak statistic Inspektorat Tahun 2017 (belum dapat naik cetak), serta penghitungan ulang biaya penggandaan.
- 5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Anggaran : Rp. 258.094.000,00
- Realisasi : Rp. 248.234.940,00
- Prosentase : 96,18%
- Hasil : meliputi pengadaan meteran roda digital, PC, laptop, printer, LCD Proyektor, scanner, wallscreen, kamera digital, dan wireless portable speaker.
- Penjelasan : pengadaan sesuai dengan perencanaan.
- 6) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
-

-
- Anggaran : Rp. 19.419.000,00
Realisasi : Rp. 10.324.000,00
Prosentase : 53,16%
Hasil : pembelian peralatan dan bahan Kebersihan, serta pengadaan mebeler kantor.
Penjelasan : terdapat perubahan harga pada pengadaan lemari kaca dengan spesifikasi yang sama.
- 7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Anggaran : Rp. 10.241.960,00
Realisasi : Rp. 5.040.000,00
Prosentase : 49,21%
Hasil : pembiayaan penyediaan surat kabar dan cetak buku peraturan perundang-undangan terbaru guna menunjang fungsi pemeriksaan penyelenggaraan dan urusan pemerintahan.
Penjelasan : cetak buku peraturan perundang-undangan tidak dilaksanakan.
- 8) Penyediaan Makanan dan Minuman
Anggaran : Rp. 37.465.000,00
Realisasi : Rp. 21.183.200,00
Prosentase : 56,54%
Hasil : pembelian makanan dan minuman untuk harian pegawai, belanja makanan dan minuman tamu (oleh-oleh tamu kunjungan kerja), dan makanan dan minuman operasional kegiatan/lapangan (tumpeng dan nasi kotak kegiatan)
Penjelasan : belanja oleh-oleh tamu dan kunjungan kerja menyesuaikan jumlah kunjungan
-

kerja riil tahun anggaran serta efisiensi belanja makanan dan minuman rapat.

- 9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- Anggaran : Rp. 136.230.000,00
- Realisasi : Rp. 123.573.851,00
- Prosentase : 90,71 %
- Hasil : pembiayaan perjalanan dinas luar daerah baik dalam Propinsi Jawa Timur maupun keluar Propinsi Jawa Timur sebagai penunjang pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
- Penjelasan : pembiayaan menyesuaikan kebutuhan.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas
- Anggaran : Rp. 412.000.000,00
- Realisasi : Rp. 411.590.000,00
- Prosentase : 99,90 %
- Hasil : pengadaan kendaraan dinas jabatan
- Penjelasan : pembiayaan sesuai penganggaran.
- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Anggaran : Rp. 164.600.000,00
- Realisasi : Rp. 126.881.350,00
- Prosentase : 77,08 %
- Hasil : pembiayaan jasa servis , suku cadang, BBM, dan STNK kendaraan dinas.
- Penjelasan : pembiayaan menyesuaikan kebutuhan pemeliharaan.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-
- 1) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Anggaran : Rp. 31.190.000,00
Realisasi : Rp. 30.370.000,00
Prosentase : 97,37%
Hasil : pengadaan batik khas Batu.
Penjelasan : pengadaan sesuai dengan perencanaan.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal
Anggaran : Rp. 0,00
Realisasi : Rp. 0,00
Prosentase : -
Hasil : meliputi pembiayaan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
Penjelasan : terdapat pengurangan anggaran pada proses PAK karena tidak terdapat diklat penjenjangan yang harus dibiayai.
- 2) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Anggaran : Rp. 16.042.100,00
Realisasi : Rp. 12.650.500,00
Prosentase : 78,86%
Hasil : pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang meliputi belanja ATK, belanja cetak penggandaan, dan belanja makanan dan minuman rapat.
Penjelasan : terdapat penyesuaian pada jumlah peserta sosialisasi yang diundang.
- 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Anggaran : Rp. 24.000.000,00
Realisasi : Rp. 18.492.528,00
Prosentase : 77,05%
Hasil : pembiayaan kegiatan pengiriman

peserta untuk mengikuti bimtek yang diselenggarakan pihak eksternal.

Penjelasan : pelaksanaan menyesuaikan kebutuhan/undangan.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Anggaran : Rp. 0,00

Realisasi : Rp. 0,00

Prosentase : -

Hasil : tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Inspektorat Kota Batu.

Penjelasan : terdapat pengurangan anggaran pada proses PAK karena alasan efisiensi anggaran (berkaitan dengan tugas fungsi).

2) Review LKPD

Anggaran : Rp. 13.896.200,00

Realisasi : Rp. 10.284.300,00

Prosentase : 74,01%

Hasil : Tersusunnya Laporan Hasil Review LKPD pada Pemerintah Kota Batu TA 2017 untuk peningkatan kualitas penyusunan LKPD Kota Batu.

Penjelasan : terdapat penyesuaian efisiensi pada belanja ATK, penggandaan, belanja makan dan minum, serta belanja perjalanan dinas luar daerah.

3) Evaluasi Laporan Capaian Kinerja SKPD

Anggaran : Rp. 27.466.100,00

Realisasi : Rp. 8.851.800,00

Prosentase : 32,23%

Hasil : Tersusunnya Laporan Hasil Review

-
- LAKIP Pemerintah Kota Batu Tahun 2017 guna peningkatan kualitas penyusunan LAKIP Kota Batu dan peningkatan nilai SAKIP SKPD.
- Penjelasan : terdapat penyesuaian efisiensi pada belanja penggandaan, belanja makan dan minum, serta belanja perjalanan dinas luar daerah karena kurang cermatan penganggaran.
- 4) Penyusunan Statistik Pengawasan
- Anggaran : Rp. 0,00
- Realisasi : Rp. 0,00
- Prosentase : -
- Hasil : Tersusunnya Statistik Pengawasan Inspektorat Kota Batu.
- Penjelasan : terdapat pengalihan biaya (cetak) pada anggaran kegiatan rutin (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan)
- 5) Review Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
- Anggaran : Rp. 25.407.400,00
- Realisasi : Rp. 7.125.550,00
- Prosentase : 28,05%
- Hasil : Tersusunnya Laporan Hasil Review RKAP-SKPD TA 2018 dan Laporan Hasil Review RKA-SKPD TA 2019.
- Penjelasan : terdapat penyesuaian efisiensi pada belanja penggandaan, belanja makan dan minum (rapat & operasional), serta belanja perjalanan dinas luar daerah karena kurang cermatan penganggaran.
- 6) Review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
- Anggaran : Rp. 25.814.500,00
-

-
- Realisasi : Rp. 2.802.375,00
Prosentase : 10,86%
Hasil : Tersusunnya Laporan Hasil Review RKPDP TA 2018 dan Laporan Hasil Review RKPDP TA 2019.
Penjelasan : Pada DPA kegiatan Review RKPDP terdapat kesalahan penganggaran sehingga diperlukan penghitungan ulang untuk dilakukan perubahan, namun karena keterbatasan waktu pelaksanaan, anggaran yang tersedia tidak dapat terserap secara maksimal (hanya terserap pada belanja ATK, materai, dan penggandaan).
- 7) Review Penyerapan Anggaran
Anggaran : Rp. 0,00
Realisasi : Rp. 0,00
Prosentase : -
Hasil : Tersusunnya Laporan Hasil Review Penyerapan Anggaran
Penjelasan : terdapat pengurangan anggaran pada proses PAK karena waktu pelaksanaan kegiatan yang berbenturan dengan kegiatan lainnya.
- 8) Review Penyerapan Pengadaan Barang/Jasa
Anggaran : Rp. 15.335.000,00
Realisasi : Rp. 4.569.800,00
Prosentase : 29,80%
Hasil : Tersusunnya Laporan Hasil Review Penyerapan Pengadaan Barang/Jasa
Penjelasan : belanja perjalanan dinas dalam daerah tidak terserap dengan maksimal karena menyesuaikan dengan jumlah cek fisik yang dilaksanakan.
-

9) Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Anggaran : Rp. 15.886.400,00

Realisasi : Rp. 8.813.125,00

Prosentase : 55,48%

Hasil : Tersusunnya Laporan Hasil Review RPJMD 2017-2022

Penjelasan : terdapat penyesuaian pada belanja makanan dan minuman operasional.

f. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Anggaran : Rp. 121.798.000,00

Realisasi : Rp. 36.742.200,00

Prosentase : 30,17%

Hasil : tersusunnya LHP PKPT sebanyak 45 Obrik

Penjelasan : terdapat ketidakcermatan penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan.

2) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Non PKPT)

Anggaran : Rp. 26.651.200,00

Realisasi : Rp. 8.706.450,00

Prosentase : 32,67%

Hasil : tersusunnya LHP Non PKPT sebanyak 30 kasus

Penjelasan : terdapat penyesuaian pada belanja ATK dan perjalanan dinas luar daerah tergantung kebutuhan.

3) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Anggaran : Rp. 29.922.500,00

Realisasi : Rp. 25.898.000,00

-
- Prosentase : 86,55%
- Hasil : terlaksananya penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK
- Penjelasan : terdapat efisiensi pada belanja makanan dan minuman rapat.
- 4) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
- Anggaran : Rp. 5.719.900,00
- Realisasi : Rp. 4.963.500,00
- Prosentase : 86,78%
- Hasil : terlaksananya Evaluasi Temuan Hasil Pengawasan (LHP BPK, LHP Inspektorat Kota Batu)
- Penjelasan : pembiayaan sesuai dengan penganggaran
- 5) Pendampingan Pemeriksaan
- Anggaran : Rp. 71.967.500,00
- Realisasi : Rp. 49.529.055,00
- Prosentase : 68,82%
- Hasil : terlaksananya pendampingan pemeriksaan yang dilaksanakan pengawas eksternal
- Penjelasan : terdapat penyesuaian pada belanja makanan dan minuman tamu, belanja perjalanan dinas dalam daerah, dan belanja perjalanan dinas luar daerah.
- 6) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Anggaran : Rp. 7.509.800,00
- Realisasi : Rp. 1.802.600,00
- Prosentase : 24,00%
- Hasil : terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prioritas pengawasan.
- Penjelasan : belanja perjalanan dinas dalam daerah
-

tidak terserap dengan maksimal karena menyesuaikan dengan jumlah cek fisik yang dilaksanakan.

- 7) Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar
Anggaran : Rp. 580.308.200,00
Realisasi : Rp. 557.299.000,00
Prosentase : 96,04%
Hasil : terlaksananya koordinasi lintas sektor terhadap pencegahan dan pemberantasan pungutan liar
Penjelasan : pembiayaan sesuai dengan perencanaan
- 8) Monev Dana Desa
Anggaran : Rp. 22.690.400,00
Realisasi : Rp. 11.804.000,00
Prosentase : 52,02%
Hasil : tersedianya Laporan Monev Dana Desa guna pemetaan masalah pemanfaatan dana desa.
Penjelasan : belanja perjalanan dinas dalam daerah tidak terserap dengan maksimal karena menyesuaikan dengan jumlah cek fisik yang dilaksanakan.
- 9) Monev Dana BOS
Anggaran : Rp. 35.416.900,00
Realisasi : Rp. 21.299.600,00
Prosentase : 62,03%
Hasil : tersedianya Laporan Monev Dana BOS guna pemetaan masalah pemanfaatan dana BOS.
Penjelasan : terdapat penyesuaian pada belanja karena kekurangcermatan penganggaran
- 10) Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Fresponsif Gender

-
- Anggaran : Rp. 27.655.200,00
Realisasi : Rp. 5.064.500,00
Prosentase : 18,31%
Hasil : peningkatan indeks pemberdayaan gender
Penjelasan : terdapat ketidakcermatan Penganggaran.
- 11) Penyelenggaraan Koordinasi TP4D
Anggaran : Rp. 517.028.900,00
Realisasi : Rp. 482.579.700,00
Prosentase : 93,34%
Hasil : terlaksananya pendampingan SKPD yang telah mengajukan surat permohonan pendampingan (5 SKPD), terlaksananya sosialisasi Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengamanan Kegiatan pemerintahan dan pembangunan Daerah.
Penjelasan : pembiayaan sesuai dengan perencanaan
- 12) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Anggaran : Rp. 45.925.000,00
Realisasi : Rp. 8.779.000,00
Prosentase : 19,12%
Hasil : terlaksananya pemeriksaan dengan tujuan tertentu sesuai tujuan tertentu.
Penjelasan : pembiayaan menyesuaikan dengan penugasan.
- 13) Pemeriksaan Serentak Kas Opname
Anggaran : Rp. 13.620.000,00
Realisasi : Rp. 9.268.000,00
Prosentase : 68,05%
Hasil : tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan Kas Opname guna mendukung tertib
-

-
- Hasil : tersedianya infrastruktur pelaporan gratifikasi dan pelaporan gratifikasi (2 laporan)
- Penjelasan : terdapat ketidakcermatan pelaksanaan pengadministrasian kegiatan.
- 18) Monev Aksi Pencegahan Korupsi
- Anggaran : Rp. 0,00
- Realisasi : Rp. 0,00
- Prosentase : -
- Hasil : Tersusunnya Laporan Hasil Monev Aksi Pencegahan Korupsi
- Penjelasan : terdapat pengurangan anggaran pada proses PAK karena waktu pelaksanaan kegiatan yang berbenturan dengan kegiatan lainnya.
- 19) Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Anggaran : Rp. 6.034.900,00
- Realisasi : Rp. 0,00
- Prosentase : 0%
- Hasil : terlaksananya pelaporan RAD PPK terintegrasi
- Penjelasan : terdapat ketidakcermatan pelaksanaan pengadministrasian kegiatan.
- 20) Verifikasi LHKASN
- Anggaran : Rp. 894.900,00
- Realisasi : Rp. 0,00
- Prosentase : 0%
- Hasil : terlaksananya verifikasi LHKASN
- Penjelasan : kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena terkendala penyediaan infrastruktur Keputusan Kepala daerah dan akses kepada aplikasi SI HARKA
- 21) Penilaian Internal Zona Integritas
-

Anggaran : Rp. 2.394.900,00
Realisasi : Rp 0,00
Prosentase : 0%
Hasil : terlaksananya penilaian internal zona integritas sebagai pilot project Wilayah Bersih Melayani
Penjelasan : kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena terkendala persyaratan dasar penilaian zona integritas (Opini BPK dan Nilai SAKIP)

22) Penanganan Whistle Blower System

Anggaran : Rp. 7.055.800,00
Realisasi : Rp. 5.987.400,00
Prosentase : 84,86%
Hasil : tersedianya infrastruktur whistle blower system berupa Peraturan Walikota
Penjelasan : pembiayaan sesuai dengan perencanaan

g. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

c. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Anggaran : Rp. 527.981.600,00
Realisasi : Rp. 202.629.382,00
Prosentase : 38,38%
Hasil : terlaksananya pelatihan kantor sendiri, diklat fungsional, dan diklat teknis bagi tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Penjelasan : diklat fungsional pembentukan Pengawas Pemerintah Muda tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan kuota peserta.

h. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

1) Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Anggaran : Rp. 938.500,00

Realisasi : Rp. 891.000,00

Prosentase : 94,94%

Hasil : tersusunnya Kebijakan Pengawasan

Penjelasan : pembiayaan sesuai dengan perencanaan

Berdasarkan hasil serapan anggaran maka ada beberapa kegiatan yang merupakan pengembangan kebijakan yang belum berjalan yaitu :

1. Penilaian Internal Zona Integritas
2. Monev Aksi Pencegahan Korupsi
3. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
4. Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

BAB IV

PENUTUP

4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

Keberhasilan kinerja Inspektorat diukur dari Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program. Sesuai Indikator dan target yang meliputi :

- a. Opini BPK dengan target WTP.
- b. Predikat Nilai Sakip Minimal B
- c. Maturitas SPIP sampai dengan level 3/ terdefinisi
- d. Persentase Desa bebas temuan kerugian daerah sebesar 90 persen
- e. Persentase OPD bebas temuan kerugian daerah sebesar 90 persen
- f. Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti sebesar 100 persen
- g. Persentase Tindaklanjut temuan sebesar 85 persen

Maka pada akhir tahun anggaran 2018, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Predikat Nilai Sakip Minimal B untuk seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu telah memenuhi target sebesar 100 persen
2. Maturitas SPIP sampai dengan level 3/ terdefinisi telah dicapai berdasarkan penilaian dari BPKP Provisnsi Jawa Timur
3. Dari 20 Pengaduan telah dilakukan tindaklanjut
4. Tindaklanjut temuan telah mencapai 85 persen
5. Persentase OPD bebas temuan kerugian daerah sebesar 91,6 persen
6. Opini BPK dengan predikat WTP untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 yang diperiksa tahun 2018.

Namum ada beberapa kegiatan yang merupakan amanat undang undang belum terlaksana, yaitu :

-
1. Penilaian Internal Zona Integritas, hal ini dikarenakan nilai Sakip Kota Batu tahun 2017 masih bernilai C, maka belum memenuhi syarat untuk melaksanakan Penilaian Internal Zona Integritas
 2. Monev Aksi Pencegahan Korupsi, karena instruksi presiden agar terintegrasi dengan system aplikasi yang telah ada di KPK, sehingga perlu ada koordinasi ulang tentang teknis penilaian
 3. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi, Dasar hukum sebagai acuan pelaksanaan sedang dalam proses penetapan
 4. Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, kegiatan ini belum terlaksana karena kekurangan sumber daya manusia

4.2 Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja serta Langkah Antisipatif

Beberapa Kendala dan hambatan pencapaian kinerja khususnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan Lingkup Inspektorat Kota Batu Tahun Anggaran 2018 secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Kendala dalam pencapaian kinerja lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal, kegiatan yang sangat bergantung pada faktor eksternal adalah Kegiatan Reviu RKA, Reviu RPJMD, Penilaian Internal Zona Integritas, Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
- b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
 - 1) Beberapa kegiatan yang bergantung pada pihak eksternal kurang matang dalam proses perencanaan dan penatausahaan bukti pengeluaran oleh PPTK. Sehingga tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
 - 2) Terdapat penyesuaian rencana kerja dengan rencana strategis yang mengacu pada RPJMD Kota Batu 2017-2022, sehingga menghambat beberapa pelaksanaan kegiatan.

Langkah antisipatif yang akan dilakukan adalah menyesuaikan anggaran yang dikelola sesuai dengan fungsi pengawasan dan melakukan evaluasi terhadap penyusunan kerangka acuan kerja sebagai bentuk evaluasi terhadap perencanaan.

4.3 Strategi Pemecahan Masalah

Permasalahan yang paling menonjol dalam pelaksanaan kinerja tahun 2018 adalah tingkat serapan Belanja Langsung sebesar 76,7 persen. Serapan anggaran yang kurang optimal dapat direduksi dengan cara melakukan evaluasi terhadap penyusunan skala prioritas pelaksanaan kegiatan khususnya bagi kegiatan yang bergantung kepada pihak eksternal. Perencanaan anggaran untuk kegiatan yang pelaksanaannya bergantung terhadap kinerja eksternal akan dianggarkan pada saat telah memiliki acuan yang kuat sebagai dasar pelaksanaannya.